



LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN

**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA MENDAPATKAN MASUKAN
TERKAIT PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)
KE PT DIRGANTARA INDONESIA
DI BANDUNG, JAWA BARAT,
TANGGAL 26—28 NOVEMBER 2023**

I. PENDAHULUAN

Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/ Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN dilakukan antara lain dalam rangka; memperbaiki struktur permodalan BUMN; dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN.

Dari sisi anggaran, dalam Nota Keuangan beserta APBN Tahun 2023 disebutkan total pembiayaan investasi termasuk PMN sebesar Rp 176 Triliun untuk 6 klaster yaitu; infrastruktur, pendidikan, perlindungan masyarakat, pangan dan lingkungan hidup, kerja sama internasional serta klaster lainnya. Adapun pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya. Sedangkan anggaran PMN tunai pada BUMN Tahun 2020—Semester I Tahun 2022 tercatat sebesar Rp135,36 triliun dengan realisasi Rp131,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, sebagaimana dalam LHP BPK RI Tahun 2021, alokasi APBN pada 5 program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015—2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana

sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut yaitu;

- 1) Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun;
- 2) Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun;
- 3) Program Pembangunan Maritim sebesar Rp5,15 triliun;
- 4) Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp2,60 triliun; dan
- 5) Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp4,25 triliun.

Dari sisi audit/pemeriksaan selama 5 tahun terakhir yang terkait dengan pengelolaan PMN pada BUMN, BPK RI melakukan pemeriksaan antara lain:

- 1) Pada Tahun 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Penyertaan Modal Negara di BUMN Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kementerian BUMN dan instansi terkait. Terdapat 10 temuan hasil pemeriksaan.
- 2) Pada Tahun 2021, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022, Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Dari LHP tersebut terdapat 70 temuan senilai Rp383,97 miliar dan USD11.88 juta dengan 107 permasalahan dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD11.88 juta.

Pada Tahun 2012, PT DI menerima PMN sebesar Rp1,4 triliun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 dan Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2012, untuk modal kerja dan investasi aset dalam rangka memenuhi komitmen *on time delivery*. Dana PMN tersebut dialokasikan untuk penggantian modal kerja yang telah dibiayai oleh PT PPA; modal kerja Persero; penguatan, regenerasi dan dekomposisi SDM; serta investasi fasilitas produksi untuk investasi dan pengembangan. Manfaat PMN Tahun 2012 antara lain: pengurangan pokok pinjaman dan meringankan beban bunga; menambah modal kerja proyek untuk mendukung program kontrak; terjadinya proses regenerasi melalui penerimaan karyawan baru; mendukung ketersediaan SDM dan peningkatan kapabilitas serta kompetensi sesuai dengan regulasi dan *customer requirement*; tersedianya fasilitas produksi yang baru dan pengembangan produk dan *services*; dan teknologi informasi yang menunjang proses operasi perusahaan.

Pada Tahun 2015, PT DI kembali menerima tambahan PMN sebesar Rp400 miliar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2015 dengan rincian: pengembangan pesawat terkait program maritim sebesar Rp85 miliar; peningkatan fasilitas perakitan dan pendukungnya kerjasama dengan Airbus sebesar Rp108 miliar; dan Aircraft Services/MRO bekerjasama dengan Airbus sebesar Rp57 miliar. Manfaat PMN Tahun 2015 antara lain: sebagai sarana *development vehicle and flying test*

bed, crew development, pilot training, dan promotion; meningkatkan teknik integrasi pesawat dengan teknologi semi otomasi di area produksi guna meningkatkan kualitas, penambahan alat kerja baru, serta kondisi hangar menjadi lebih baik; meningkatkan kapasitas dan fasilitas MRO serta meningkatkan fasilitas *customer training center* untuk memenuhi kepuasan pelanggan khususnya pelayanan purna jual; serta meningkatkan pembiayaan proyek dengan utilitas fasilitas kredit bank yang diperoleh dengan pemenuhan margin deposit, sehingga perolehan *revenue* dari penjualan produk dapat ditingkatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, BAKN DPR RI perlu melakukan kunjungan kerja lapangan ke PT Dirgantara Indonesia (Persero) terkait dengan pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Dengan kunjungan kerja lapangan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan lapangan dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) terkait dengan gambaran realisasi penggunaan dana PMN, program kerja yang telah dilaksanakan serta rencana kerja ke depannya serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Dirgantara Indonesia (Persero) dilaksanakan pada tanggal 26-28 November 2023.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, S.E, M.M	KETUA BAKN DPR RI/F. PD
2.	A-201	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI/ F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-083	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-367	SAAN MUSTOPA, M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.NASDEM
7.	A-018	Drs. H. FATHAN, M.A.P.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	PARID, S.E	KABAG SET. BAKN

11.	--	SENO WIBISUKMANA, S.Kom, QRMA., CGAA.	KASUBBAG TU SET. BAKN
12.	--	NURUL ISTIQLAL, A.Md.	STAF SET. BAKN
13.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
15.	--	FEBRI KUNTARTO, S.E., MBA	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	MITA WAHYUNINGSIH, S.E., M.Si.	TENAGA AHLI BAKN
17.	--	FARKHAN FAJAR ILHAMI	TV PARLEMEN
18.	--	MOCH ANDRI NURDIANSYAH	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL
19.	--	EDIN ZAINAL ABIDIN	PENGEMUDI

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Kunjungan lapangan ke PT DI (Persero) di Bandung, Jawa Barat dihadiri oleh;

1. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM, Bpk Wildan Arief
2. Kepala Divisi Perencanaan Perusahaan, Bpk Gatot Mulya Pribadi
3. Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Bpk sumarsono
4. Kepala Divisi Akuntansi, Bpk Arif
5. Kepala Divisi Perencanaan & Pengendalian Produksi, Bpk M. Robiawan

BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan gambaran realisasi penggunaan dana PMN, program kerja yang telah dilaksanakan serta rencana kerja ke depannya serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI. Adapun poin-poin penting dalam pertemuan tersebut ialah sebagai berikut.

1. PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PT DI

- a. Penyertaan Modal Negara pada PT. Dirgantara Indonesia pada APBN TA 2012 sebesar Rp1.400 Miliar memiliki tujuan untuk modal kerja dan Investasi Aset dalam Rangka Memenuhi Komitmen On time delivery. Alokasi dana PMN diantaranya Rp 20M untuk penggantian Modal Kerja yang Telah dibiayai oleh PT PPA; Rp 391M untuk Modal kerja persero; Rp282 Miliar untuk penguatan, regenerasi & dekomposisi SDM; serta Rp707 Miliar untuk Investasi fasilitas produksi untuk investasi & pengembangan. dan Anggaran PMN 2012 sudah terserap Rp1.400 Milyar atau 100% dari Total Anggaran.
- b. Penyertaan Modal Negara pada APBN-P TA 2015 PP No. 118 Tahun 2015 sebesar Rp400M bertujuan Memperkuat struktur pemodalannya untuk meleverage pendanaan dengan quick win, menambah kemampuan produksi dengan alokasi Rp85 M untuk pengembangan pesawat maritim/maritime patrol aircraft (MPA); Rp108 M untuk Peningkatan fasilitas perakitan pesawat dan pendukungnya; Rp57 M untuk aircraft services/maintenance repair 7 overhaul (MRO); dan Rp150 M untuk ketersediaan modal kerja, dan Anggaran PMN 2015 sudah terserap Rp400 Milyar atau 100% dari Total Anggaran.
- c. Masih terdapat kegiatan yang berstatus on going pada PMN PT. Dirgantara Indonesia, diantaranya adalah Program pembentukan karakter, Penyiapan Sistem human capital dan organisasi dan INDIRECT EFFECT OF LIGHTNING (IEL) TEST N219, serta Pembembangan pesawat CN235 MPA masih berstatus on going.

2. LAPORAN TINDAK LANJUT LHP BPK RI OLEH PT DI

- a. Pekerjaan Pembangunan Pintu Hanggar Aircraft Service (ACS). PT DI telah melaporkan Tindak Lanjut Temuan BPK RI dengan mengirimkan surat kepada Asdep Bidang Industri Manufaktur Nomor : PTD/054/KU0000/01/2023, tanggal 19 Januari 2023, perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PT Dirgantara Indonesia. Status temuan: evaluasi "sesuai rekomendasi" di BPK
- b. Pekerjaan Pembangunan Pintu Hanggar Aircraft Service (ACS)

- Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran rekanan sebesar Rp305.780.719,84 yang tidak mengerjakan pekerjaan sesuai gambar kerja yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian. PTDI telah melakukan pemotongan terhadap pembayaran ke vendor senilai Rp305.780.719,84. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah diterima 100% selesai.
- Memerintahkan Pengawas Lapangan supaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan terutama untuk pekerjaan yang masih berlangsung. Sesuai dengan hirarki kebijakan dan pengelolaan di lingkungan PTDI, pengawasan langsung terkait dengan kinerja di lapangan di delegasikan kepada Kepala Divisi terkait, dalam hal ini Kepala Divisi Pengadaan Umum dan Jasa Fasilitas (PF).

3. **KAJIAN ATAS DAMPAK PEMANFAATAN PMN TA 2015**

PTDI direkomendasikan mengagendakan penyelenggaraan kajian naskah akademik bersama kementerian terkait perumusan dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) untuk Peningkatan Daya Saing Industri Kedirgantaraan, antara lain : PP PMN PTDI ▪ PP Insentif Khusus Industri Dirgantara ▪ PP Perlindungan PTDI ▪ PP Perpajakan Industri Kedirgantaraan (Produk PTDI) ▪ PP Perlindungan Perdagangan LN Produk PTDI ▪ PP Pendukung Kemitraan dengan PMA ▪ PP SDM Industri Kedirgantaraan.

III. **KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN**

Kesimpulan kunjungan lapangan ke PT Dirgantara Indoensia Bandung, Jawa Barat ialah sebagai berikut.

1. Kajian atas Dampak Pemanfaatan PMN TA 2015, diantaranya merekomendasikan pemerintah untuk: Mendukung terus pengembangan Industri Strategis seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang memiliki berbagai keunggulan melalui regulasi dan investasi secara berkelanjutan dan Mensinergikan PTDI dengan Instansi/Kementerian dan Perusahaan terutama BUMN agar dapat memanfaatkan PTDI sebagai institusi unggul dan terpercaya serta memprioritaskan pembelian produk/pesawat sejenis dari PTDI, dibandingkan dengan membeli dari luar.
2. Tingkat produksi dan efisiensi PT DI masih di bawah 50 persen. Permasalahan utamanya bukan PTDI tidak mampu memproduksi pesawat, akan tetapi karena faktor pemasarannya yang belum maksimal sehingga tidak bisa memproduksi pesawat. BAKN mendorong agar pemasaran yang dilakukan PTDI dapat maksimal. Sehingga, kapasitas produksinya bisa optimal.
3. Kegiatan kunjungan lapangan bertujuan untuk mendalami permasalahan yang dihadapi PTDI, sehingga BAKN DPR RI bisa menilai apa yang bisa dibantu terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima PTDI bisa lebih bermanfaat dan berdaya guna. BAKN DPR RI berharap Industri kedirgantaraan Indonesia diharapkan bisa berdampak meningkatkan ekonomi.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari PT Dirgantara Indoensia Bandung. Dengan pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan PT Dirgantara Indoensia.

